

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMUTIHAN DAN PEMBEBASAN BEA
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA PENERIMAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR**

Oleh

I Gede Pasek Astika, NIM 2257023031

Jurusan Ekonomi dan Akuntansi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas kebijakan pemutihan dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor pada penerimaan pajak kendaraan bermotor Provinsi Bali tahun 2019 – 2023. Setiap daerah diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri begitupun pada Provinsi Bali. Pada Provinsi Bali, pajak memiliki peran penting dalam membiayai keuangan daerah agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Salah satu pajak yang berkontribusi cukup besar pada Provinsi Bali yaitu pajak kendaraan bermotor. Selain itu, berdasarkan data bahwa masih banyaknya jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan APBD Provinsi Bali. Melihat adanya masalah tersebut Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan kebijakan pemutihan dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor untuk memaksimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi yang nantinya data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan analisis efektivitas.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa tingkat efektivitas kebijakan pemutihan dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor menunjukkan kriteria sangat efektif dengan persentase sebesar 110% pada tahun 2019, mengalami kenaikan sebesar 8% pada tahun 2020 dengan persentase sebesar 118%, sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan yang disebabkan karena kenaikan dan penurunan nominal target yang ditentukan oleh BAPENDA Provinsi Bali dan terjadinya Pandemi Covid-19 yaitu sebesar 5% dengan persentase sebesar 113%, pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 2% dengan persentase 115%, pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 1% dengan persentase 116%.

Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Tingkat Efektivitas, Kebijakan Pemutihan, Kebijakan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

**THE EFFECTIVENESS OF THE BLEACHING POLICY AND EXEMPTION
FROM MOTOR VEHICLE TRANSFER TAX ON MOTOR VEHICLE TAX
REVENUES**

By

I Gede Pasek Astika, NIM 2257023031

Departement of Economics and Accounting

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness level of the policy on tax amnesty and exemption of motor vehicle title transfer fees on motor vehicle tax revenue in Bali Province from 2019 to 2023. Each region is granted the authority to manage its own governance, including Bali Province. In Bali, taxes play an important role in financing regional development to improve the welfare and prosperity of its people. One of the major contributing taxes in Bali Province is the motor vehicle tax. Moreover, data shows a significant number of motor vehicle tax arrears, which can affect the overall motor vehicle tax revenue and the Regional Budget (APBD) of Bali Province. In response to this issue, the Bali Provincial Government implemented a policy of tax amnesty and exemption of motor vehicle title transfer fees to maximize motor vehicle tax revenue. This study uses a quantitative method with a descriptive approach, employing data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. The data obtained will be analyzed using effectiveness analysis.

Based on the results of the research, it is concluded that the effectiveness level of the tax amnesty and exemption policy for motor vehicle title transfer fees falls into the "very effective" category. It reached a percentage of 110% in 2019, increased by 8% to 118% in 2020, and then decreased in 2021 to 113% (a drop of 5%) due to fluctuations in target figures set by the Bali Provincial Revenue Agency (BAPENDA) and the impact of the COVID-19 pandemic. In 2022, there was an increase of 2% with a percentage of 115%, followed by a further increase of 1% in 2023, reaching 116%.

Keywords: Motor vehicle tax, Effectiveness Level, Tax Bleaching Policy, Exemption From Motor Vehicle Transfer Tax.